

ANALISIS RASIO KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2012-2016

Yeni Dwi Ningtias, Tatas Ridho Nugroho, Nur Ainiyah

Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Majapahit Mojokerto (Yeni Dwi Ningtias)

Email : yeni39_17@yahoo.com

Abstract

Research in the District / City in East Java Province aims to find out and analyze the financial performance of the Regional Government in the 2012-2016 budget year. The type of research used is quantitative descriptive which uses secondary data, the data processed is a summary of the Regional Budget for 2012-2016 Fiscal Year. The population of this study is the District and City Regional Governments in East Java Province with a total of 38 Regions. Samples from this study were taken using census methods, namely the selection of all members of the population to be studied. The results of the calculation and analysis of the Regional Financial Performance can be concluded, that the pattern of the relationship of the level of regional independence of 25.783% is on consultative criteria. The level of local government fiscal decentralization is still less than 14.054%, but the level of effectiveness of regional financial management is 127.561%, which is very effective and the level of efficiency of regional financial management is 9,446%, which is very efficient. The Shopping Harmony Ratio shows indirect spending of 61.785% and direct expenditure of 38.218% has not been balanced. Based on the results of the calculation and analysis of the Regional Financial Capability it can be concluded, the condition of the financial capability of the District / City in East Java Province is not yet ideal. Judging from the results of the Share and Growth calculation, the position of the Regency / City in East Java Province is in quadrant II and from the calculation of the Financial Ability Index, its Financial Ability is still relatively high and not yet effective and efficient.

Keywords: Financial Ratios, APBD, Local Government Financial Performance.

Abstrak

Penelitian pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2012-2016. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yang menggunakan data sekunder, data yang diolah adalah Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012-2016. Populasi dari penelitian ini yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah 38 Daerah. Sampel dari penelitian ini diambil menggunakan metode sensus yaitu pemilihan dari semua anggota populasi yang akan diteliti. Hasil perhitungan dan analisis Kinerja Keuangan Daerah dapat disimpulkan, bahwa pola hubungan tingkat kemandirian daerah sebesar 25,783% berada pada kriteria konsultatif. Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah masih kurang sebesar 14,054%, namun tingkat Efektivitas pengelolaan keuangan daerah 127,561% terbilang sangat efektif dan tingkat Efisiensi pengelolaan keuangan daerah 9,446% terbilang sangat efisien. Rasio Kesorasian Belanja menunjukkan belanja tidak langsung 61,785% dan Belanja langsung 38,218% belum seimbang. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis Kemampuan Keuangan Daerah dapat disimpulkan, kondisi kemampuan keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur belum ideal. Dilihat dari hasil perhitungan Share dan Growth, posisi Kabupaten/Kota di Provinsi

Jawa Timur berada pada kuadran II dan dari perhitungan Indeks Kemampuan Keuangan Kemampuan Keuangannya masih tergolong tinggi dan belum efektif dan efisien.

Kata Kunci : *Rasio Keuangan, APBD, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.*

A. Pendahuluan

Pemerintah merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh Negara untuk mengurus segala keperluan dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat juga beserta aturan yang akan dilaksanakan agar memberi dampak positif dan berguna bagi suatu Negara tersebut. Kegiatan pelayanan pemerintahan daerah terhadap masyarakat sering menjadi sorotan publik, karena seiring kesadaran masyarakat terhadap manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan dari instansi pemerintah tersebut yang dinilai kurang maksimal seperti dalam persoalan pembelanjaan anggaran sering terjadi pemborosan dana, penyelewengan dana, dan penyelenggaraan administrasi publik yang kurang efisien dan transparan sehingga hal tersebut menimbulkan gejolak yang berakar pada ketidakpuasan. Kondisi ini mendorong adanya pemeriksaan dalam efisiensi kinerja terhadap pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sangat penting dilakukan karena dengan begitu kita dapat mengetahui tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah disetiap tahunnya, sehingga ditahun berikutnya pemerintah bisa mampu meningkatkan efektifitas kerjanya. Menurut Abdul Halim (2007:230) dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk menilai kinerja Pemda dalam mengatur keuangan daerahnya.

Beberapa pemerintah daerah yang telah menyelenggarakan otonomi daerah, tetapi dalam pengelolaan keuangannya masih saja terdapat hasil yang kurang maksimal. Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu Nanik Wahyuni (2012) pada Kota Malang, hasil penelitiannya menunjukkan berdasarkan analisis rasio keuangan dalah baik, dengan rata-rata realisasi PAD sebesar 100,97%, akan tetapi ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki seperti kemandirian yang rendah dan dalam membelanjakan dana yang perlu dievaluasi lagi. Selanjutnya penelitian Mentari Kurnia Dharmawati dan Ririn Irmadariyani (2016) pada kabupaten Banyuwangi yang hasil penelitiannya sudah baik, akan tetapi menurut rasio kemandirian hasinya rendah dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada bantuan pihak eksternal masih tinggi, hasil rasio efektifitas yaitu realisasi penerimaan PAD melebihi anggaran yang disediakan. Penelitian Anis Karlina (2017) pada kota Surabaya, Hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kota Surabaya dilihat dari Varians Pendapatan Daerah selama Tahun 2012-2015, hasil penelitiannya dapat dikatakan kurang baik, hal ini dibuktikan pada varians pendapatan daerah rata-rata di bawah 100% dan rasio keuangan daerah yang dilihat dari derajat desentralisasi hasil rata-ratanya 53,54%. Kemudian penelitian Tatas Ridho Nugroho (2018) pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur dengan hasil penelitian secara parsial ukuran pemerintah daerah size berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan intergovernmental revenue berpengaruh positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah, kemudian belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah disebabkan proporsi belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah lebih banyak digunakan untuk kebutuhan konsumtif daripada kebutuhan produktif seperti belanja modal. Hal ini menjadikan alasan yang kuat untuk dilakukannya penelitian ini pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Maka Analisis Rasio Keuangan perlu dilakukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan cara mengitung Kinerja Keuangan Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah untuk menilai efektifitas dari Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Kinerja Keuangan APBD pada pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dari hasil perhitungan Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Keserasian Belanja. Kemudian Bagaimana Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur diukur melalui Share dan Growth Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peta Kemampuan Keuangan Daerah, dan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK), dan sejauh mana pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur bisa melakukan efisiensi dan efektifitas terhadap pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012 sampai dengan 2016.

Tujuan adanya penelitian ini adalah Untuk mengetahui Kinerja Keuangan APBD berdasarkan hasil perhitungan Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Keserasian Belanja. Kemudian untuk menilai Kemampuan Keuangan Pemerintahan Daerah diukur melalui Share dan Growth, Peta Kemampuan Keuangan Daerah, dan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK), dan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur terhadap pengelolaan dana APBD tahun anggaran 2012 sampai dengan 2016.

B. Kajian Teori

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pengertian APBD Menurut Moh. Mahsun (2011:81) ialah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja daerah selama satu tahun. Sedangkan menurut Arifin Sabeni (2003:39) Tujuan anggaran yaitu merencanakan dan mengatur berapa rupiah yang akan dikeluarkan dalam satu periode tahun anggaran.

Analisis Rasio Keuangan

Pengertian analisa rasio menurut Sofyan Syafri Harahap (2002:194) adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi tempat informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang memiliki makna dengan yang lain, baik antara data kuantitatif maupun data non kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat berperan penting dalam proses pengambilan keputusan yang benar. Sedangkan analisis rasio keuangan menurut Halim (2002:126) dengan cara menghitung analisis rasio tersebut dapat digunakan untuk menganalisis Kinerja Keuangan Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah. Analisis Kinerja Keuangan Daerah , dihitung menggunakan :

- a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

- b. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

- c. Rasio Efektivitas

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD berdasarkan Potensi Rill Daerah}} \times 100\%$$

d. Rasio Efisiensi

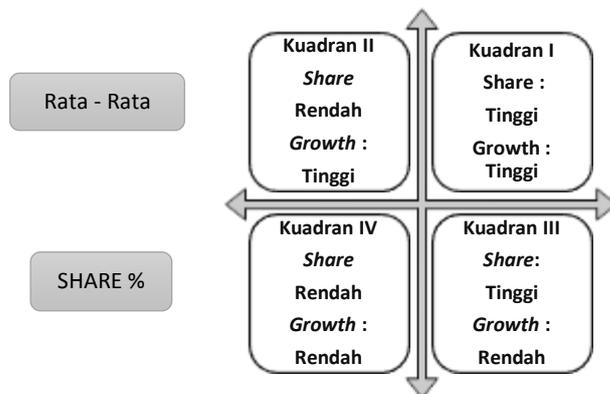
$$\frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan untuk Menungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

e. Rasio Kerasian Belanja

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Analisis Kemampuan Keuangan Daerah yang menggunakan Perhitungan dan Analisis *Share* dan *Growth* :



$$\text{Share} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Growth} = \frac{\text{PAD}_i}{\text{PAD}_{i-1}} \times 100\%$$

Menghitung Indeks Kemampuan Keuangan (IKK), menggunakan rumus :

$$\text{Indeks X} = \frac{(\text{Nilai x Hasil Pengukuran}) - (\text{Nilai x Kondisi Minimum})}{(\text{Nilai x Kondisi Maksimum}) - (\text{Nilai x Kondisi Minimum})}$$

$$\text{Persamaan IKK} = \frac{\text{XG} + \text{XE} + \text{XS}}{3}$$

Kinerja Keuangan Daerah

Sistem pengukuran kinerja sektor publik menurut Iyahul Ulum (2009:19-21) adalah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Pengukuran kinerja sektor publik dapat dilakukan dengan beberapa tujuan. Tujuan yang pertama, pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk membantu memperbaiki hasil dari kinerja pemerintah. Pengukuran Kinerja dimaksudkan agar dapat membantu pemerintahan untuk fokus pada tujuan dan sasaran program kerja pemerintah daerah. Sehingga dapat meningkatkan hasil yang efektif dan efisien pada pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan pada masyarakat. Kedua, hasil pengukuran dari kinerja sector public dapat digunakan untuk mengalokasikan sumberdaya yang ada dan sebagai bahan pengambil keputusan. Terakhir, pengukuran kinerja sektor public betujuan untuk

mempertanggung jawabkan kepada masyarakat dan memperbaiki hubungan komunikasi antar lembaga.

Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja anggaran menurut Bastian (2006:112) adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Sedangkan Abdul Halim (2012:230) berpendapat bahwa salah satu cara yang dilakukan dalam mengukur kinerja pemerintahan daerah dalam mengelola keuangannya adalah menggunakan perhitungan analisis rasio keuangan terhadap laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sudah dilaksanakan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan menurut Bastian (2010:9) ialah merupakan suatu hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk mengambil suatu keputusan bagi pihak yang membutuhkannya. Dalam penyajian laporan keuangan yang merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban secara tertulis terhadap kinerja keuangan yang telah dicapai. Secara umum dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Mardiasmo (2004:37) adalah untuk memberikan informasi dan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam ekonomi, social juga politik yang gunanya sebagai bukti pertanggung jawaban atas pengelolaan, serta sebagai bahan dalam mengevaluasi kinerja menajerial maupun organisasional.

C. Metode Penelitian

Jenis Desain Penelitian

Jenis dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015:13), metode dalam penelitian kuantitatif diartikan sebagai penelitian yang memacu pada prinsip *positivisme*, yang hasilnya dipakai dalam beberapa populasi, pengambilan data memakai instrument penelitian, analisis data yang berupa kuantitatif/statistik, yang bertujuan sebagai bahan uji hipotesis yang ditetapkan.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, Data sekunder menurut Sugiyono (2014:131) yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti dengan menggunakan media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data dalam penelitian ini merupakan data dari Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur yang berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode anggaran 2012 sampai dengan 2016. Kemudian hasil dari perhitungan yang telah dilakukan maka dibuat grafik dyang akan menghasilkan kesimpulan berkenaan dengan kinerja keuangan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 12 April 2018 dengan menggunakan objek pada pemerintah daerah kabupaten dan kota diseluruh Provinsi Jawa Timur periode 2012-2016 dengan mengambil data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang sudah bisa diakses dan tersedia dalam websitenya yaitu www.djpk.depkeu.go.id .

Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugiyono (2012:90) adalah wilayah generalisasi (penyamartaan) yang terdiri atas obyek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang diharuskan oleh peneliti untuk dipelajari dan hasilnya dapat disimpulkan. Populasi dari penelitian ini yaitu Semua kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur yang akan diteliti. Adapun penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini yang menggunakan metode sensus. Sampling jenuh (sensus) menurut Sugiyono (2002:61-63) adalah tehnik penentuan sampel bila

semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel dari penelitian ini diambil menggunakan metode sensus yaitu pemilihan semua anggota populasi yang akan diteliti berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan kota diseluruh provinsi Jawa Timur tahun periode 2012 -2016.

Analisis Data

Menurut Jonathan Sarwono (2006:138) metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode statistik deskriptif. Metode statistik deskriptif mengacu pada olahan data mentah menjadi suatu bentuk data yang akan membuat pembaca lebih mudah mengerti dan menafsirkan maksud dan tujuan dari data atau angka yang ditampilkan. Adapun teknik analisa data dapat dilakukan dengan beberapa tahap yaitu Mengumpulkan data yang akan dijadikan objek penelitian berupa anggaran dan realisasi APBD kabupaten dan kota diseluruh Provinsi Jawa Timur dengan tahun periode 2012 sampai tahun 2016. Kemudian menghitung rasio keuangan daerah dan dari hasil tersebut membuat grafik perhitungan rasio keuangan dari setiap tahunnya. Terakhir menganalisis dan membahas tabel dan grafik dengan indikator yang sesuai dengan teori dan menarik kesimpulan.

D. Hasil dan Pembahasannya

Analisis Kinerja Keuangan Daerah

1) Rasio Kemandirian

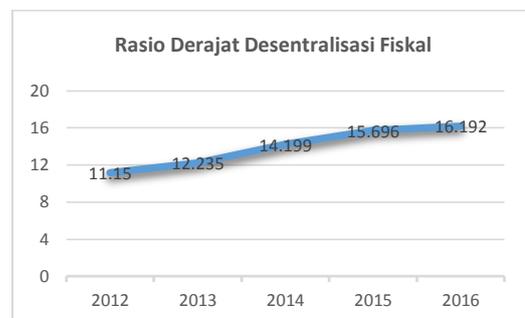
Tahun	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
2012	18,619%	Instruktif
2013	21,477%	Instruktif
2014	28,408%	Konsultatif
2015	32,646%	Konsultatif
2016	27,764%	Konsultatif
Rata-Rata	25,783%	Konsultatif



Jadi rata-rata rasio kemandirian Kabupaten dan Kota di seluruh Provinsi Jawa Timur selama 5 tahun sebesar 25,783%. Dengan jumlah tersebut, Tingkat kemandirian pemerintah daerah pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur periode 2012 sampai dengan 2016 dikatakan masih tergolong rendah, sehingga masuk kedalam kategori Konsultatif yaitu berkisar 25%-50% yang artinya nilai ketergantungan Pemerintah Kabupaten dalam membiayai kegiatan pemerintahannya masih sangat bergantung pada pihak ekstern atau Pemerintah pusat.

2) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tahun	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal
2012	11,150%	Kurang
2013	12,235%	Kurang
2014	14,996%	Kurang
2015	15,696%	Kurang
2016	16,192%	Kurang
Rata-Rata	14,054%	Kurang



Rata-rata yang diperoleh selama 5 periode yaitu 14,054%. Dengan jumlah tersebut, Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur masih tergolong dikategori kurang. Hal ini menunjukkan bahwa, tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah cenderung kecil.

3) Rasio Efektifitas

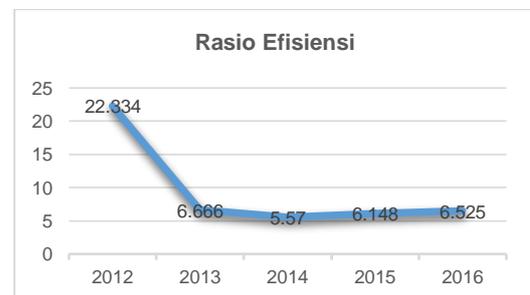
Tahun	Rasio Efektifitas	Kriteria Rasio Efektifitas
2012	127,064%	Sangat Efektif
2013	122,926%	Sangat Efektif
2014	141,844%	Sangat Efektif
2015	127,376%	Sangat Efektif
2016	118,594%	Sangat Efektif
Rata-Rata	127,561%	Sangat Efektif



Meskipun mengalami penurunan di beberapa periode Jumlah Rasio Efektifitas setiap tahunnya dan jumlah rata-rata selama 5 periode masih tergolong tinggi yaitu 127,561% dengan jumlah tersebut menurut Kriteria Rasio Efektifitas, Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur tingkat efektifitasnya dikategorikan Sangat Efektif. Hal ini dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah telah mampu merealisasikan pendapatan asli daerah dari anggaran yang ditargetkan berdasarkan potensi riil daerah.

4) Rasio Efisiensi

Tahun	Rasio Efisiensi	Kriteria Rasio Efisiensi
2012	22,334%	Cukup Efisien
2013	6,666%	Sangat Efisien
2014	5,570%	Sangat Efisien
2015	6,148%	Sangat Efisien
2016	6,525%	Sangat Efisien
Rata-Rata	9,449%	Sangat Efisien



Dari data diatas dapat disimpulkan dari 5 periode tersebut rata-rata Rasio Efisiensi dari kabupaten dan kota di seluruh Provinsi Jawa Timur termasuk sangat efisien dengan nilai 9,446%. Hal ini menggambarkan tingkat kemampuan daerah semakin baik.

5) Rasio Keserasian Belanja

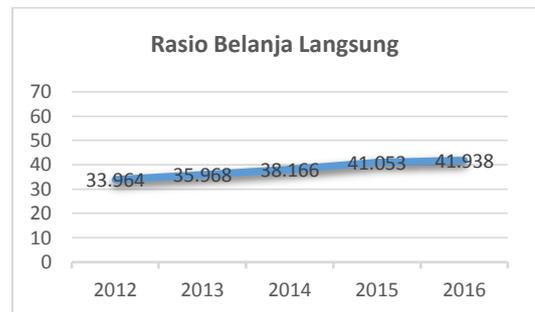
Rasio Belanja Tidak Langsung

Tahun	Rata-Rata Rasio Belanja Tidak Langsung
2012	66,036%
2013	64,032%
2014	61,847%
2015	58,947%
2016	58,062%
Rata-Rata	61,785%



Rasio Belanja Langsung

Tahun	Rata-Rata Rasio Belanja Langsung
2012	33,964%
2013	35,968%
2014	38,166%
2015	41,053%
2016	41,938%
Rata-Rata	38,218%



Rasio Keserasian Belanja memperlihatkan bahwa antara rasio belanja langsung dan belanja tidak langsung masih belum berimbang. Terbukti dari perhitungan rasio belanja tidak langsung 61,785% dan rasio belanja langsung 38,218% , yang artinya pemerintah daerah cenderung memakai dana untuk pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung daripada belanja yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan. Seharusnya hasil belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung. Kedua rasio tersebut selisih 23,567%, berarti Pemerintah Daerah seharusnya bisa meningkatkan Belanja Langsung agar kualitas outputnya meningkat, agar fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi bisa berjalan dengan baik.

Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

1) *Share* dan *Growth*

Tahun	Rata-Rata <i>Share</i>
2012	11,632%
2013	12,650%
2014	15,875%
2015	15,852%
2016	15,580%
Rata-rata	14,318%

Tahun	Rata- Rata <i>Growth</i>
2012	231,118%
2013	248,871%
2014	202,591%
2015	210,535%
2016	198,108%
Rata-rata	218,245%

2) Peta Kemampuan Keuangan Daerah

Hasil perhitungan dari *Share* dan *Growth* yang telah dilakukan terhadap ringkasan APBD Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 sampai 2016, maka diperoleh data rata-rata *share* sebesar 14,318% dan jumlah rata-rata *growth* sebesar 218,245%. Kemudian dengan Metode Kuadran berdasarkan pemetaan kemampuan keuangan daerah posisi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur terdapat pada kuadran II (dua), yaitu nilai *share* rendah dan nilai *growth* tinggi. Bisa disimpulkan Kondisi ini belum ideal, tetapi daerah mempunyai pengembangan potensi lokalyang masih bisa diolah, sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam total belanja. Hal ini disebabkan Sumbangan PAD terhadap Total Belanja masih rendah namun pertumbuhan (*growth*) pendapatan asli daerah tinggi.

3) Indeks Kemampuan Keuangan

a) Indeks Elastisitas

Tahun	Nilai (%)	Kondisi Maksimal (%)	Kondisi Minimal (%)	Indeks (%)
2012	0,333611341	0,410804447	0,333611341	0,000
2013	0,342334417	0,410804447	0,333611341	0,113
2014	0,410804447	0,410804447	0,333611341	1,000
2015	0,378508671	0,410804447	0,333611341	0,582
2016	0,409582332	0,410804447	0,333611341	0,984
Jumlah				2,679

$$X_e = \frac{\text{Jumlah Indeks}}{n} = \frac{2,679}{5} = 0,536$$

b) Indeks Share

Tahun	Nilai (%)	Kondisi Maksimal (%)	Kondisi Minimal (%)	Indeks (%)
2012	0,116324674	0,158745808	0,116324674	0,000
2013	0,126496111	0,158745808	0,116324674	0,240
2014	0,158745808	0,158745808	0,116324674	1,000
2015	0,158523052	0,158745808	0,116324674	0,995
2016	0,155799274	0,158745808	0,116324674	0,931
Jumlah				3,165

$$X_s = \frac{\text{Jumlah Indeks}}{n \text{ tahun}} = \frac{3,165}{5} = 0,633$$

c) Indeks Growth

Tahun	Nilai (%)	Kondisi Maksimal (%)	Kondisi Minimal (%)	Indeks (%)
2012	2,311178851	2,488711531	1,981081923	0,650
2013	2,488711531	2,488711531	1,981081923	1,000
2014	2,025910698	2,105353712	1,981081923	0,361
2015	2,105353712	2,488711531	1,981081923	0,245
2016	1,981081923	2,488711531	1,981081923	0,000
Jumlah				2,256

$$X_g = \frac{\text{Jumlah Indeks}}{n \text{ tahun}} = \frac{2,256}{5} = 0,451$$

Indek Kemampuan Keuangan

$$IKK = \frac{X_e + X_s + X_g}{3}$$

$$IKK = \frac{0,536 + 0,633 + 0,451}{3}$$

$$IKK = \frac{1,620}{3} = 0,540$$

Indeks Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 sampai Tahun 2016, skala indeks menunjukkan angka 0,540. Ini berarti Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tergolong tinggi. Dalam hasil analisis rasio kemandirian yang memiliki tingkat kemandirian yang tergolong masih rendah, artinya tingkat kemampuan keuangan pemerintah daerah yang tinggi yang disebabkan dari masih besarnya bantuan keuangan pemerintah pusat. Hasil tersebut sangat berkebalikan dengan amanat otonomi daerah yang mengharuskan kemandirian dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya.

E. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

- 1) Analisis Kinerja Keuangan Daerah bisa disimpulkan bahwa pola hubungan tingkat kemandirian daerah berada pada kriteria konsultatif atau bisa dikatakan rendah. Hasil rata-rata Rasio Kemandirian adalah sebesar 25,783%. Ini menunjukkan bahwa, posisi pemerintah pusat masih dominan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Kemudian rata-rata Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal berjumlah 14,054%. Artinya, Pemerintah Pusat masih memberikan kuasa dan kepercayaan tanggung jawab yang kecil pada Pemerintah Daerah. Namun, tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten serta Kota di Provinsi Jawa Timur terbilang sangat efektif dan sangat efisien. Ini terlihat dari tingginya rata-rata Rasio Efektivitas yang berjumlah 127,561% dan rendahnya rata-rata Rasio Efisiensi yang berjumlah 9,449%. Rasio Keserasian Belanja memperlihatkan bahwa keseimbangan antar belanja belum sesuai atau selaras. Pemerintah Daerah lebih menggunakan dananya untuk kegiatan Belanja Tidak Langsung dibandingkan Belanja Langsung. Semestinya hasil dari belanja tidak langsung lebih kecil dari pada belanja langsung.
- 2) Kondisi kemampuan keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur ditinjau dari hasil perhitungan rata-rata *Share* sebesar 14,318% dan *Growth* sebesar 218,245%, sehingga posisi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur terdapat pada posisi kuadran II yang berarti berada pada posisi ini kondisi masih belum ideal. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur masih bisa mencari lebih banyak lagi potensi yang dimiliki daerah, sehingga lebih dapat menaikkan pendapatan asli daerah yang berkedudukan tinggi dalam APBD. Dilihat dari hasil perhitungan Indeks Kemampuan Keuangan, skala indeks menunjukkan angka 0,539978 yang berarti kemampuan keuangan masih tergolong tinggi. Tingginya tingkat kemampuan keuangan ini disebabkan oleh besarnya bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat yang ditampilkan pada hasil analisis rasio kemandirian. Dalam pengertian amanat otonomi daerah, hal ini sangat tidak sesuai disebabkan dalam otonomi daerah yang diharuskan kemandirian dan kuasa dalam menjalankan urusan dalam setiap tugasnya.
- 3) Berdasarkan hasil analisis diatas maka bisa disimpulkan bahwa Efisiensi dari Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur masih belum maksimal dan efisien karena terdapat kurang maksimalnya Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, dan Rasio Keserasian Belanja juga hasil Kemampuan Keuangan Daerah yang tinggi.

Saran

- 1) Dalam peningkatan potensi disetiap daerah, pemerintah harus meningkatkan potensi yang dimiliki di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Karena jika dimaksimalkan secara benar, dapat dijadikan penopang dalam meningkatkan PAD. dengan begitu Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur bisa meningkatkan Kemandirian dalam memenuhi

kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat.

- 2) Dalam hasil yang telah diperoleh di Rasio Kecerasan Belanja yang menunjukkan belum seimbang, maka Pemerintah Daerah harus lebih condong menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Langsung sehingga peran anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi bisa beroperasi dengan bagus dan maksimal. Agar bisa mendapatkan kondisi dimana tingkat kemampuan keuangan berada dalam posisi ideal, Pemerintah daerah harus mengurangi ketergantungan terhadap dana bantuan dari Pemerintah Pusat. Hal ini bisa dilakukan dengan cara dengan mengoptimalkan potensi yang ada untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang dapat digunakan untuk mengurangi besarnya dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. (2006). Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Bisma, I Dewa Gde & Susanto, Hery. (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-3007. *Jurnal Ganec Swara Edisi Khusus*. Volume 4. Nomor 3.
<http://unmasmataram.ac.id/wp/wp-content/uploads/12.-I-Dewa-Gde-Bisma.pdf>
- Halim, Abdul. (2007). Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, Sofyan Syafri. (2011). Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Joko Pramono. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). Vol.7 No:13. Juli 2014.
http://eprints.ums.ac.id/26910/11/NASKAH_PUBLIKASI.pdf
- Karlina, A. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2012-2015. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* .Volume 6. Nomor 3.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Mahmudi. (2007). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahsun, Muhammad. (2013). Pengukuran Kinerja Sektor Publik Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Andi:Yogyakarta.
- Martono, Nanang. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: PT Raya Grafindo Persada.

- Mentari Kurnia dan Ririn Irmadariyanti. (2016). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*.
<http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/73234/MENTARI%20KURNIA%20DHARMAWATI.pdf?sequence=1>
- Muhammad Hidayat, Muhammad Fikry hadi dan Dwi Widiarsih. (2016). Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Dalam Era Otonomi Daerah. *Jurnal Sungkai*. Vol.4. No.2. Hal :36-55.
<http://e-journal.upp.ac.id/index.php/sungkai/article/view/1035/719>
- Nugroho, T. R. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten & Kota Di Jawa Timur. *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 7(1), 27-34.
<http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/assets/article/viewFile/1823/1660>
- Nurhayati. (2015). Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokon Hulu. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*. Vol.4. No.1.
http://e-journal.upp.ac.id/index.php/Cano/article/view/394/pdf_14
- Nurlan Darise. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). Jakarta: Indeks.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta.
- Wahyuni, N. (2012). Analisis rasio untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah kota malang. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 1(1)
<http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/el-muhasaba/article/view/1879/pdf>
- Ulum Ihyahul. (2009). Audit Sektor Publik, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Uma Sekaran. (2006). Metodologi Penelitian Untuk Bisnis, Edisi Keempat. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.